

**PENGARUH APBDes TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
DAN INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Tesis)

Oleh

Okto Ariyanto
NPM 2020011022



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PENGARUH APBDES TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN
INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL) DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

OKTO ARIYANTO

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PADes, DD, ADD, Dana Bagi Hasil, Dana Lain-lain, Luas Wilayah Desa, dan Jumlah Penduduk Desa, terhadap Indeks Desa Membangun. belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji f pada level signifikansi 10% ($\alpha=0,1$).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan PADes, DD, ADD, Dana Bagi Hasil, Dana Lain-lain, Luas Wilayah Desa, dan Jumlah Penduduk Desa, berpengaruh nyata terhadap Indeks Desa Membangun. Secara parsial Variabel yang berpengaruh nyata terhadap Indeks Desa Membangun adalah variabel Dana Desa),Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Retribusi, dan Jumlah Penduduk. Variabel PADes, Dana lainnya, luas wilayah tidak berpengaruh nyata terhadap Indeks Desa Membangun.

Sedangkan hasil penelitian secara simultan belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan adalah variabel belanja bidang pembangunan desa dan belanja bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa. Variabel belanja bidang pemerintahan desa, belanja bidang pembinaan masyarakat, belanja bidang pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan.

Kata kunci : Indeks Desa Membangun, Indeks Ketahanan Lingkungan, APBDes

ABSTRACT

The Effect of APBDes on the Building Village Index (BVI) and the Environmental Resilience Index (ERI) in the Regency of South Lampung

By

OKTO ARIYANTO

The goal of this study was to determine and assess the impact of PADes, DD, ADD, Profit Sharing Funds, Miscellaneous Funds, Village Area, and Villagers on the Building Village Index. spending on village government, expenditure on village development, expenditure on village community development, expenditure on village community empowerment, expenditure on disaster management, and expenditure on village emergencies to the South Lampung Regency Environmental Resilience Index This study took a quantitative approach, and the test employed multiple linear regression using a t test and a f test at a 10% significance level ($\alpha = 0.1$).

The results of this research reveal that PADes, DD, ADD, Profit Sharing Funds, Miscellaneous Funds, Village Area, and The Number of Villagers all have a genuine influence on the Building Village Index at the same time. The factors Village Funds, Village Fund Allocation, Profit Sharing and Levy Funds, and Population have a real influence on the Building Village Index. Variables such as PADes, other Funds, and territorial area have no actual impact on the Building Village Index.

Meanwhile, the results of a simultaneous research of village government expenditures, village development expenditures, village community empowerment expenditures, disaster management expenditures, and village emergency had a significant effect on the Environmental Resilience Index. The factors that have a substantial influence on the Environmental Resilience Index are partially expenditure on village development and spending on disaster management and village emergency. The factors of spending on village governance, expenditure on community development, and spending on empowerment had no influence on the Environmental Resilience Index.

Keywords: Building Village Index, Environmental Resilience Index, APBDes

**PENGARUH APBDes TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
DAN INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Okto Ariyanto

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

Pada

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Multidisplin Universitas Lampung



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PENGARUH APBDES TERHADAP INDEKS
DESA MEMBANGUN (IDM) DAN INDEKS
KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL) DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Okto Ariyanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020011022

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 196910031994031004

A black ink signature of Dr. Teguh Endaryanto, written over a horizontal line.

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P
NIP 197804302008121001

A blue ink signature of Dr. Maulana Mukhlis, written over a horizontal line.

Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si.
NIP 198005182001121002

A blue ink signature of Dr. Arif Sugiono, written over a horizontal line.

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

A blue ink signature of Dr. Ir. Samsul Bakri, written over a horizontal line.

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP 196105051987031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.



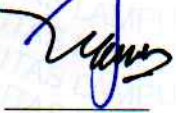
Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP.



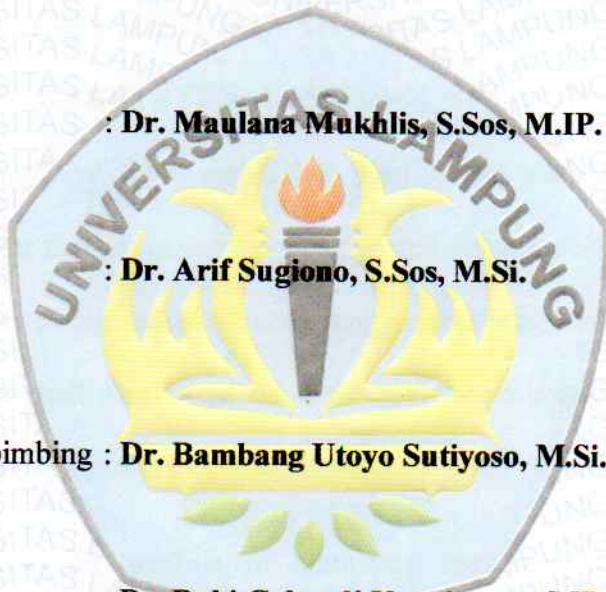
Anggota : Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Bambang Utoyo Sutyoso, M.Si.**



Anggota : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A.



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 Agustus 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **“PENGARUH APBD_{es} TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN (IKL) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Okto Ariyanto

Okto Ariyanto
NPM 2020011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Okto Ariyanto. Penulis dilahirkan di Way Urang, 16 Oktober 1985, merupakan anak keempat dari dua bersaudara pasangan bapak Ibrahim dan Ibu Murdiah. Pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Way Urang Kabupaten Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2007, SLTP N 1 Kalianda Lampung Selatan yang diselesaikan pada Tahun 2000, serta melanjutkan di SMK N 2 Kalianda Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2003.

Pada tahun 2010, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, dan mengambil jurusan manajemen dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2020 di terima di Magister Ilmu Lingkungan Penulis turut aktif dalam kegiatan penelitian.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini dengan sepenuh cinta kasih untuk:

Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi:

Abah dan Emak,

Yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu tulus, mendoakan dengan tiada hentinya sabar serta pengorbanan yang tiada batas dan segala dukungan dalam langkah.

Istriku yang tercinta Mirna Rianita Untari

Yang senantiasa memberikan motivasi, saran, mendoakan, dukungan, semangat dan kasih sayang kepadaku yang begitu tulus.

Anak-anakku yang sangat ku sayang

Yang senantiasa selalu menjadi penyemangat.

Sahabat- Sahabat tercintaku, di MIL terima kasih atas dukungan dan motivasinya

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

Jika berkata jangan berdusta (ki cawa dang bebuhungan), jika berjanji tepati (aki bujanji tepati), jika berpegian setungguan (aki lapah setunggunan) dan jika bekerja sama sebagi (aki kutsi sebagi)

(Okto Ariyanto)

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(Al-Mujadilah:11)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh APBDes Terhadap Indeks Desa Membangun Dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Muklis, S.Sos, M.IP. selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung sekaligus pembimbing kedua dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta motivasi dalam penulisan tesis ini..
5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. selaku pembimbing utama penulis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si selaku pembimbing ketiga dan pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si selaku penguji utama yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
9. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. selaku pembahas kedua yang telah memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
10. Pak Heri dan tim admin Magister Ilmu Lingkungan, atas arahan, bantuan, dan segala macam keperluan penulis selama menjalani perkuliahan hingga wisuda penulis
11. Kepada ibu Zulvina Ratnasari, S.Si., M.Si. sebagai rekan diskusi sekaligus penyemangat di BAPPEDA Lampung Selatan yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi mengenai data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tesis ini
12. Bapak Amir Rachman sebagai rekan diskusi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
13. Sahabatku di Bappeda khususnya Ibu Pretty Wulandari, S.Si., M.Si. Dan Wayan Wardana S.Si., M.Si. yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .
14. Sahabatku, di Magister Ilmu Lingkungan, khususnya Mahasiswa Kerjasama Kabupaten Lampung Selatan abang Harry Fajar Insyana, Bapak Budi Rianto, Bapak Aris Fitriansyah, Syarifudin Aziz, Ibu Pepi Puspitasari, Ibu Yustika P, Ibu Fera Trisiska, Indah Triani, Feni Astiti yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis serta bahu membahu dalam perkuliahan sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .
15. Untuk istriku tercinta Mirna Rianita Untari dan anak-anak ku tersayang, Afsheena Azma Ibrahim dan Kholif Abhifandya Ibrahim yang telah mengiklaskan hatinya, sabar selama 2 tahun ayah menempuh pendidikan di MIL ini.
16. Untuk me myself terima kasih sudah bertahan sejauh ini, bekerja keras,berjuang, menangis, bangkit, tidak pernah berhenti, dan saya tidak akan berhenti sampai i reach what i want dengan izin Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Bandar Lampung, Juli 2022

Okto Ariyanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Kerangka Pemikiran	9
1.4 Hipotesis	11
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Anggaran	13
2.1.1 Pengertian Anggaran	13
2.1.2 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 14	
2.1.3 Definisi Pendapatan Desa	15
2.1.4 Definisi Belanja Desa	19
2.2 Konsep Indeks Desa.Membangun	23
2.2.1 Variabel Didalam Indeks Desa Membangun.....	25
2.2.2 Metode Penyusunan Idm	26
2.3 Konsep Indeks Ketahanan..Lingkungan.....	26
III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	28
3.3 Metode Penelitian	28
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Populasi dan Sampel.....	31

3.6.1	Populasi.....	31
3.6.2	Sampel Jenuh (Sampel Sensus)	32
3.7	Metode Analisis.....	32
3.7.1	Statistik Deskriptif	32
3.7.2	Regresi Linier Berganda	32
3.7.3	Koefisien Determinasi (R Square).....	34
3.7.4	Uji F (simultan).....	34
3.7.5	Uji t (parsial).....	35
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	36
4.1.1	Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Lampung Selatan.....	36
4.1.1.1	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan	37
4.1.2	Geografi Kabupaten Lampung Selatan.....	38
4.2	Hasil Penelitian Pendapatan Desa Terhadap IDM	45
4.2.1	Uji Asumsi Klasik PADes (X_1), DD (X_2), ADD (X_3), Dana Bagi Hasil (X_4), Dana Lain-lain (X_5), Luas Wilayah Desa (X_6), dan Jumlah Penduduk Desa (X_7), terhadap Indeks Desa..Membangun (Y_1).	45
a.	Uji Normalitas Data.....	45
b.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
c.	Hasil Uji Multikolineritas	47
4.2.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda PADes (X_1), DD (X_2), ADD (X_3), Dana Bagi Hasil (X_4), Dana Lain-lain (X_5), Luas Wilayah Desa (X_6), dan Jumlah Penduduk Desa (X_7), terhadap Indeks Desa..Membangun (Y_1).....	48
a.	Koefisien Determinasi (R Square).....	48
b.	Korelasi.....	49
c.	Uji F (simultan).....	49
d.	Uji t (parsial).....	50
4.3	Pembahasan Pendapatan Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk terhadap IDM.....	52

4.3.1	Pembahasan pengaruh PADes (X_1), Dana Desa (X_2), Alokasi Dana Desa (X_3), Dana Bagi Hasil (X_4), Dana Lain-lain (X_5), Luas Wilayah Desa (X_6), dan Jumlah Penduduk Desa (X_7) terhadap Indeks Desa.. Membangun (IDM).	52
a.	Pengaruh Pendapatan Asli Desa (X_1) terhadap Indeks Desa. Membangun.	55
b.	Pengaruh Dana Desa (X_2) terhadap Indeks Desa. Membangun.	57
c.	Pengaruh Alokasi Dana Desa (X_3) terhadap Indeks. Desa. Membangun.	64
d.	Pengaruh Dana Bagi Hasil (X_4) terhadap Indeks. Desa. Membangun.	66
e.	Pengaruh Dana lainnya (X_5) terhadap Indeks. Desa. Membangun.	67
f.	Pengaruh Luas Wilayah (X_6) terhadap Indeks. Desa. Membangun.	68
g.	Pengaruh Jumlah Penduduk (X_7) terhadap Indeks Desa. Membangun.	69
4.4	Hasil Penelitian Belanja Desa Terhadap IKL.	71
4.4.1	Uji Asumsi Klasik Belanja Bidang Pemerintahan Desa (X_1), Belanja Bidang Pembangunan Desa (X_2), Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (X_3), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X_4), Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa (X_5) terhadap IKL (Y).	71
a.	Hasil Uji Normalitas Data	71
b.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	72
c.	Hasil Uji Multikolineritas	73
4.4.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Bidang Pemerintahan Desa (X_1), Belanja Bidang Pembangunan Desa (X_2), Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (X_3), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X_4), Belanja	

Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa (X_5) terhadap IKL (Y_2).	74
a. Koefisien Determinasi (R Square).....	74
b. Korelasi antar Variabel	75
c. Hasil Uji F (simultan).....	76
d. Hasil Uji t (parsial)	76
4.5 Pembahasan Belanja Desa Terhadap IKL	79
4.5.1 Pembahasan Pengaruh Bidang Pemerintahan Desa (X_1), Belanja Bidang Pembangunan Desa (X_2), Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (X_3), Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X_4), Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa (X_5) terhadap IKL (Y_2). ..	79
a. Pengaruh Belanja Bidang Pemerintahan Desa (X_1) terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan	82
b. Pengaruh Belanja Bidang Pembangunan Desa (X_2) terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan	83
c. Pengaruh Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa (X_3) terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan	88
d. Pengaruh Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X_4) terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan.....	90
e. Pengaruh Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Desa (X_5) terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan	92
V SIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Simpulan.....	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Desa	2
Tabel 2 Status Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan IDM Tahun 2016	3
Tabel 3 Status Desa Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan IDM Tahun 2016, 2018 dan 2019	3
Tabel 4 Anggaran Dana desa Tahun 2015-2019	5
Tabel 5 Dimensi dan Variabel Indeks Desa..Membangun (IDM)	25
Tabel 6 Operasionalisasi Variabel	29
Tabel 7 Jenis data dan sumber data	31
Tabel 8 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019	40
Tabel 9 Luas Wilayah Kecamatan dan Kepadatan Penduduk.	41
Tabel 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	43
Tabel 11 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 12 Model Summary Kontribusi Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat	48
Tabel 13 Korelasi Antar Variabel	49
Tabel 14 Hasil Uji F (simultan)	49
Tabel 15 Hasil Uji t (parsial)	50
Tabel 16 Total Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Status Kabupaten Tahun 2018-2020.	53
Tabel 17 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 18 Model Summary Kontribusi Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat	74
Tabel 19 Hasil Uji F (simultan)	76
Tabel 20 Hasil Uji t (parsial)	76
Tabel 21 Nilai Rata-Rata Indeks Ketahanan lingkungan Tahun 2018-2020	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian. Pengaruh sumber dana terhadap IDM dan belanja desa terhadap IKL.	10
Gambar 2. Peta wilayah penelitian	39
Gambar 3 Hasil Uji Normalitas Data (Kurva Normal P-Plot)	45
Gambar 4 Hasil Uji Normalitas (<i>Bell-shaped Curve</i>)	46
Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
Gambar 6 Pelayanan Kesehatan Oleh Petugas Kesehatan Desa candi Mas	59
Gambar 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD Desa Pisang	59
Gambar 8 Pembangunan Perpustakaan Desa Bulok Kecamatan Kalianda	60
Gambar 9 Penyediaan air bersih dan air minum layak.	60
Gambar 10 Penyambungan jaringan air bersih menuju pemukiman	61
Gambar 11 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal	61
Gambar 12 Pasar Desa Sido Harjo Kecamatan Way Panji	63
Gambar 13 Jalur Evakuasi Tsunami Desa Toto Harjo	64
Gambar 14 Hasil Uji Normalitas Data (Kurva Normal P-Plot)	71
Gambar 15 Hasil Uji Normalitas (<i>Bell-shaped Curve</i>)	72
Gambar 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Gambar 17 Tower Penampungan Air Bersih dan Sumur Bor Desa Jondong	85
Gambar 18 Jalur PIPANISASI Menuju Rumah Warga.	85
Gambar 19 Penampungan Limbah Komunal Desa Toto Harjo Kecamatan Bakauheni	86
Gambar 20 Pengelolaan Sampah Organik Pasar Pasuruan	87
Gambar 21 Penanaman Pohon di Kawasan Gunung Rajabasa dan Desa Way Kalam.	87
Gambar 22 Pemandian Way Tebing Cepa Desa Taman Baru.	88
Gambar 23 memperlihatkan rambu arah evakuasi menuju balai desa toto harjo	93
Gambar 24 Sosialisasi Tanggap Bencana	93
Gambar 25 Pembentukan dan Pelatihan Relawan	94

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kesenjangan pembangunan antara desa satu dengan desa lainnya dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan suatu alat ukur tingkat pembangunan desa (Yulitasari dan Tyas 2020). Selain itu menurut Hanibal (2015:2), IDM dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan desa dan bermanfaat dalam menganalisis status pembangunan masing-masing desa yang erat kaitannya dengan karakteristik dan dikembangkan sebagai instrumen untuk mencapai target rencana pembangunan pemerintah. Dimensi pembentuk yang digunakan untuk menetapkan status desa dalam IDM menurut Hanibal (2015:5), adalah Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi).

Salah satu dimensi pembentuk IDM adalah ketahanan lingkungan, dimana desa dituntut untuk menjaga kualitas lingkungan (pencemaran air, tanah dan udara) dan potensi rawan bencana (kejadian bencana dan upaya pencegahan potensi bencana). Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup makhluk disekitarnya sehingga masalah pencemaran menjadi pokok dalam pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan yang baik adalah hak bagi seluruh masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah dalam hal ini pemerintahan desa.

Pencemaran lingkungan merupakan faktor rusaknya lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup disekitarnya, beberapa sumber pencemaran di desa yaitu zat buang yang dihasilkan dari produksi UMKM yang ada di desa dan limbah rumah tangga yang menjadi limbah berpotensi merusak sumber-sumber air yang ada di desa berupa sungai. Permasalahan penanganan sampah di desa yang harus di atasi untuk mencegah permasalahan-permasalahan baru berupa pencemaran udara

yang dihasilkan dari pembusukan sampah dan pembakaran sampah, pencemaran air dan tanah yang disebabkan cairan dari timbunan sampah, selain tanah penggunaan pestisida dan pupuk dalam pertanian secara berlebih juga berpotensi menghasilkan pencemaran.

Selain menjaga kualitas lingkungan Indeks Ketahanan lingkungan di Desa juga berperan untuk melindungi masyarakat serta wilayahnya dari potensi bencana alam dengan cara :

- 1) Menyediakan informasi dan peta wilayah rawan bencana untuk tiap jenis bencana di desa;
- 2) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi keadaan bencana;
- 3) Pengaturan dan penataan kawasan, jalur evakuasi rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana;
- 4) Upaya pencegahan dari potensi bencana yang bisa terukur (banjir luapan sungai, genangan dipemukiman dll).

Klasifikasi desa dibedakan menjadi 5 status desa yang ditampilkan pada tabel

1. Klasifikasi Desa menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dan status perkembangan Desa sekaligus sebagai rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Tabel 1 Klasifikasi Desa

Status Desa	Nilai Batas
Desa Sangat Tertinggal	$IDM \leq 0,4907$
Desa Tertinggal	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
Desa Berkembang	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
Desa Maju	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
Desa Mandiri	$IDM > 0,8155$

Sumber : SOP IDM, 2017

Status seluruh desa yang ada di wilayah Negara Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 2016. Provinsi Lampung memiliki 13 wilayah administratif setingkat Kabupaten, yang desa-desanya juga tidak luput dari pemberian status tersebut. Hasil dari pemberian status desa pada tahun 2016 di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki persentase desa maju dan mandiri yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di

Provinsi Lampung. Adapun jumlah Desa pada tiap-tiap status desa di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2 Status Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan IDM Tahun 2016

Kabupaten	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
Tulangbawang	17	92	37	1	
Way Kanan	6	118	95	2	
Pesawaran	10	73	61		
Pringsewu	1	58	63	4	
Mesuji	9	68	27	1	
Tulang Bawang Barat	2	61	29	1	
Pesisir Barat	8	70	38		
Lampung Utara	21	163	46	2	
Lampung Tengah	3	127	159	12	
Lampung Timur	2	129	119	14	
Lampung Selatan	2	98	139	16	1
Tanggamus	44	177	74	4	
Lampung Barat	26	72	32	1	

Sumber : Kementerian Desa dan PDTT

Berdasarkan data Kementerian Desa dan PDTT, diketahui pada tahun 2016, status desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 1 desa mandiri, 16 desa maju, 139 desa berkembang, 98 desa tertinggal, dan 2 desa sangat tertinggal, Sedangkan ditahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana untuk desa mandiri berjumlah 2 desa, desa maju berjumlah 147 desa, desa tertinggal berjumlah 81 desa. Kemudian pada tahun 2019 tidak terdapat lagi desa di Kabupaten Lampung selatan yang berstatus desa mandiri dan desa sangat tertinggal, desa tertinggal berjumlah 13 desa, desa berkembang berjumlah 206 desa. Jumlah desa pada tiap-tiap status desa di Kabupaten Lampung Selatan ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3 Status Desa Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan IDM Tahun 2016, 2018 dan 2019

Tahun	Status Desa				
	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
2016	1	16	139	98	2
2018	2	20	147	81	6
2019	-	37	206	13	-

Sumber : Kementerian Desa dan PDTT

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merubah suatu konsep yang selama ini berlaku, dimana desa tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan melainkan menjadi subjek dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat, asal usul, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang berpedoman pada 13 asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu demokrasi, kesetaraan, kebersamaan, keberagaman, kekeluargaan, kemandirian, kegotongroyongan, musyawarah, partisipasi, pemberdayaan, rekognisi, subsidiaritas, dan keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebutuhan dana mengikuti fungsi organisasi dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran untuk mengatasi dan mengelola potensi yang dimiliki.

Desa sebagai subjek dalam pembangunan diberikan sumber pendapatan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan dan mengelola potensi yang ada di desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pendapatan desa dapat digunakan untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialokasikan sebagai belanja desa. Pasal 72 Undang undang nomor 6 tahun 2014 ayat (1), menjelaskan pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
- b. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%);
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% setelah dikurangi DAK);
- e. Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD masing-masing Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang berasal dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Dana Desa yang sudah dilaksanakan dari tahun 2015 dan mengalami peningkatan dari semula Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 70 triliun di tahun 2019. Besaran anggaran Dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditampilkan pada tabel 4.

Tabel 4 Anggaran Dana desa Tahun 2015-2019

Tahun	Dana Desa
2015	20,8 Triliun
2016	46,9 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun

Sumber : Buku Pintar Dana Desa, 2019.

Selain dana desa, desa juga mendapat sumber penghasilan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diberikan Kabupaten/Kota kepada desa minimal sebesar 10 Persen dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung yang memiliki 17 kecamatan dan 256 desa didalamnya, secara rata-rata pendapatan terbesar yang diterima desa di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pembagina dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, rata-rata Dana Desa yang diterima oleh desa di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 adalah Rp. 1.020.812.086,00, sedangkan rata-rata Alokasi Dana Desa menurut Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pembagina dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah Rp 418.359.375,00.

Pemerintah desa diwajibkan mampu melakukan pengelolaan anggaran dengan baik dan bijak sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan sasaran meningkatkan keberhasilan pembangunan desa, kemandirian desa dan keberlanjutan. Pengelolaan dana desa yang begitu besar perlu diselenggarakan dengan manajemen yang baik serta akuntabel agar dapat dikelola untuk kemajuan

dan kesejahteraan masyarakat desa. Masing-masing desa dituntut dapat merencanakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan untuk meningkatkan keunggulan di masing-masing desa.

Penelitian tentang pemanfaatan sumber dana APBDes terhadap pembangunan desa telah banyak dilakukan, seperti penelitian Gani *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa berpengaruh positif terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi/lingkungan. Sehingga semakin baik nilai dana desa dapat meningkatkan nilai indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Oktaviana & Bachruddin (2017) menyimpulkan IDM di Provinsi Banten yang rendah perlu ditingkatkan dengan cara pemerintah provinsi menaikkan dimensi variabel indeks ketahanan ekonomi dan Ekologi.

Upaya menaikkan nilai indeks ketahanan ekonomi dan ekologi menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dengan cara menentukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh desa untuk meningkatkan pembangunan dari segi ekonomi dan ekologi. Selain itu Muhtarom *et al.* (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan Indeks ketahanan sosial Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penekanan penganggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat akan lebih condong terhadap intervensi ketahanan ekonomi disebabkan dalam bidang tersebut sub kegiatan-kegiatan berupa koperasi, menanam modal, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan sedangkan sub kegiatan yang mendekati ketahanan sosial adalah sub kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam penelitian Arina., *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa Secara bersama-sama ADD dan DD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Secara parsial Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara artinya semakin tinggi DD maka semakin tinggi indeks desa membangun dan Secara parsial ADD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara artinya semakin tinggi ADD maka semakin tinggi indeks desa membangun. Perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh (Sunu, M, K dan Utama, M 2019) yang menyimpulkan

DD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi DD, semakin rendah angka kemiskinan. DD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin tinggi DD maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam penelitian (Wirda, 2013), menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya pembangunan keluar dari hasil yang dimusyawarahkan antara aparat desa bersama masyarakat ataupun pengawasan yang tidak berjalan semestinya.

Alokasi Belanja APBDDes yang terdiri dari belanja pemerintahan desa, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja bidang pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, belanja bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan APBDes (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), luas wilayah desa dan jumlah penduduk desa secara simultan terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan APBDes (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), luas wilayah desa dan jumlah penduduk desa secara parsial terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 ?
3. Bagaimana pengaruh belanja APBDes (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) secara simultan terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 ?

4. Bagaimana pengaruh belanja APBDes (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) secara parsial terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 ?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh penerimaan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), luas wilayah desa dan jumlah penduduk desa secara simultan terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
2. Menganalisis besarnya pengaruh penerimaan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), luas wilayah desa dan jumlah penduduk desa secara parsial terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
3. Menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) secara simultan terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
4. Menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) secara parsial terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

1.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Indonesia menjadikan pusat pembangunan dari pinggiran, dimana pembangunan dilakukan mulai dari pinggiran wilayah menuju perkotaan. Pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian yang kuat dan sumber daya yang baik untuk menyokong pembangunan nasional. Selama ini kita menyakini banyak terjadi ketimpangan dalam pembangunan terutama di desa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan diantaranya adalah faktor geografis, kepemilikan sumber daya (manusia maupun alam), faktor keberpihakan terhadap anggaran dan lain-lainnya. Agar setiap desa mampu melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

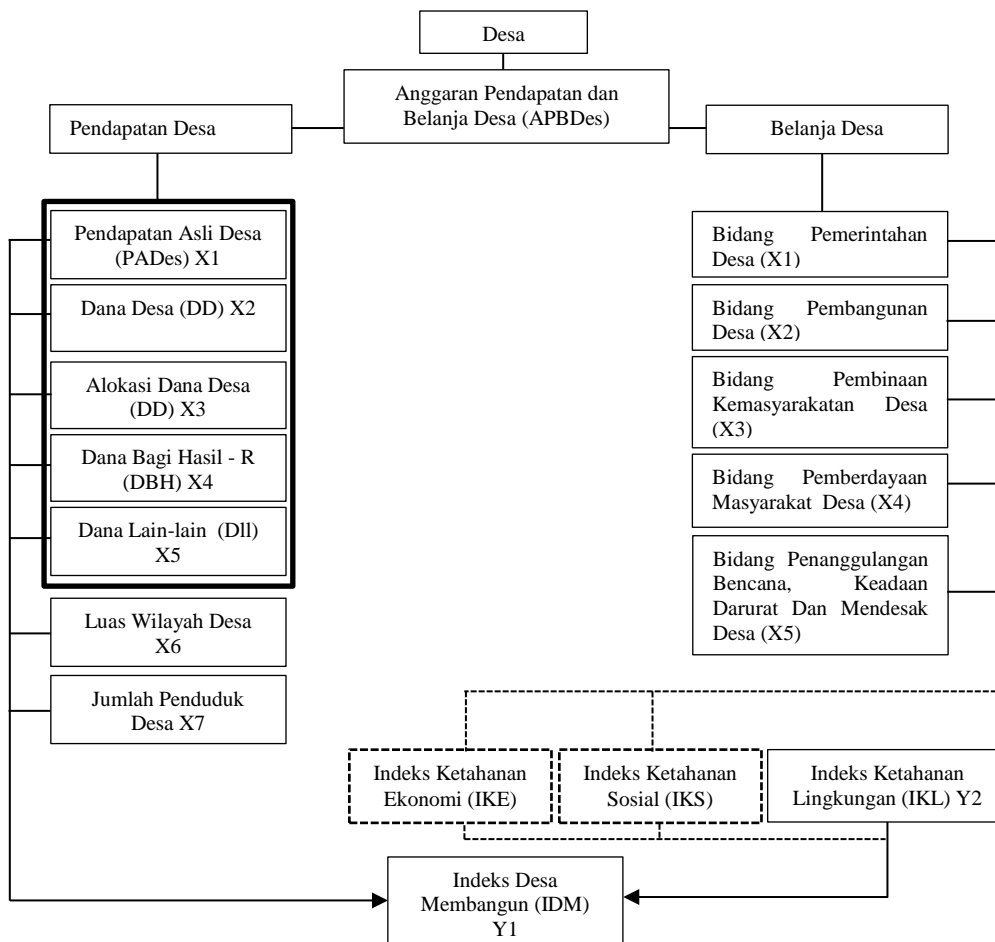
Dalam penelitian ini akan mencari pengaruh sumber dana APBDes (PADes, DD, ADD, DBH dan Dana lain-lain) serta luas wilayah dan jumlah penduduk desa terhadap Indeks Desa Membangun. Dan bagaimana pengaruh belanja desa (belanja bidang pemerintahan desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan negara, sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Dengan semakin besarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akan semakin besar. Modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggaran diperlukan agar peningkatan pengeluaran tersebut mencapai sasaran prioritas program pembangunan pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan keuangan publik yang bermutu dan yang berorientasi pada hasil diperlukan untuk

mempertahankan dukungan publik terhadap peningkatan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rosen dan Gayer, 2008).

Mutu pengelolaan keuangan publik dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran negara dapat menyentuh kebutuhan hidup masyarakat. Anggaran negara dapat meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan mendasar. Untuk mencapai hal tersebut perlu tahapan penganggaran yang transparan dan mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat diperlakukan sebagai subjek dalam menyusun dan menjalankan anggaran dimaksud. Pemerintah mengarahkan anggaran untuk perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Diagram kerangka pemikiran penelitian disajikan pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian. Pengaruh sumber dana terhadap IDM dan belanja desa terhadap IKL.

1.4 Hipotesis

Adapun hipotesis sebagai jawaban sementara atas penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H₀ : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pendapatan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₁ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pendapatan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₀ : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pendapatan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₂ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pendapatan APBDesa (PADes, DD, ADD, DBH, Dana lain-lain), jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₀ : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₃ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) terhadap capaian

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

- H₀ : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- H₄ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pengeluaran APBDesa (Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa) terhadap capaian Indeks Ketahanan Indeks Desa Membangun Lingkungan (IKL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut PP No. 34 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Yang dimaksud dengan anggaran adalah pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah dan direncanakan secara sistemik untuk satu waktu. Selanjutnya Bastian (2006:1) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48), Anggaran adalah dokumen yang terdiri dari perkiraan kerja dalam bentuk penerimaan dan biaya yang ditunjukkan dalam ukuran moneter yang akan dicapai selama periode waktu tertentu, serta data sebelumnya sebagai bentuk kontrol dan tinjauan kinerja. Nafarin (2007:11) meyakini, “Anggaran adalah rencana tertulis untuk operasi organisasi yang direpresentasikan secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam istilah moneter. Pengertian lebih khusus dikemukakan oleh Sumarsono (2009:115), yang mendefinisikan anggaran daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang merencanakan pilihan kebijaksanaan dalam suatu periode badan yang akan datang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas anggaran dapat diartikan rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang dinyatakan kuantitatif (angka) yang dinyatakan dalam satuan uang sebagai alat bantu guna mengimpleasikan rencana tersebut.

Sedangkan pada sektor publik, anggaran merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

2.1.2 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan yang mencatat sumber pemasukan dan belanja desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dalam jangka waktu 1 tahun. Didalam laporan tersebut terkandung berbagai urusan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat. Urusan yang dimaksud meliputi : pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Proses penyusunan APBDes diawali dengan dilaksanakannya musyawarah dusun untuk menghasilkan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan dusun tersebut mencerminkan hal-hal kongkrit yang ingin dilaksanakan oleh warga suatu dusun. Dokumen perencanaan seluruh dusun dikompilasi menjadi RKPDes. Kepala Desa menyusun R-APBDes berdasarkan RKPDes yang telah disusun sebelumnya. R-APBDes selanjutnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). R-APBDes yang telah di bahas bersama kemudian disahkan menjadi APBDes untuk tahun berjalan.

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Dokumen Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dana lokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa).

Menurut Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan

kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas anggaran dapat diartikan bahwa APBDes merupakan suatu instrumen kebijakan utama pemerintahan desa, anggaran desa digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran desa, dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang. Sumber pembangunan ukuran-ukuran untuk evaluasi kerja dan alat koordnasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja yang dilakukan selama satu tahun.

2.1.3 Definisi Pendapatan Desa

Yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Jenis-jenis pendapatan desa :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin tinggi kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli desa atau yang disingkat PADesa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Jika PADesa bisa

ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa (Balandatu, 2016). Desa mandiri adalah ketika suatu Desa dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah (Basirrudin, 2012 dalam Atmadja, et al 2018). Kesadaran masyarakat desa untuk meningkatkan PADes masih harus ditingkatkan. Ketergantungan dana dari pusat dan pemerintah daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan desa berdasarkan kekayaan dan potensi desa setempat (Supriadi, et al : 2016).

Berdasarkan beberapa definisi di atas PADes adalah pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi desa, untuk pembiayaan pembangunan desa sehingga desa dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mengurangi ketergantungan dana dari pusat dan pemerintah daerah.

b) Dana Desa

Menurut Puspawijaya (2016:57), Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (2) yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

c) Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara: (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undan; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahtraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna ADD (pemerintah desa) dalam mengelola dan menata usahakan Alokasi dana desa (ADD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan ADD harus gunakan secara efektif dan efisien.

d) Dana Bagi Hasil dan Retribusi

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Kesit Bambang Prakoso (2003 : 1): Pengertian Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan masing-masing Peraturan Daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005 : 5), "Retribusi Daerah adalah Pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara".

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah sebagai berikut: "Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ini diberikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa dan pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dana bagi hasil pajak dan retribusi adalah iuran dan pembayaran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang, yang berada pada tingkatan Kabupaten/Kota yang dikembalikan ke desa untuk digunakan membiayai kegiatan operasional pemerintahan desa dan pembangunan desa.

2.1.4 Definisi Belanja Desa

Belanja desa adalah belanja yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Adapun klasifikasi belanja Desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan . Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Bidang-bidang belanja desa :

- **Bidang Pemerintahan Desa**

Menurut Syafi'ie (2003) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- b) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1 : belanja desa bidang pemerintahan desa adalah belanja desa yang diperuntukkan kedalam sub kegiatan :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

Berdasarkan definisi diatas belanja desa bidang pemerintahan adalah suatu perbuatan, cara dan urusan dari badan yang memerintah suatu desa untuk menyelenggarakan kegiatan desa, yang di beri penghasilan tetap, melakukan perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

- **Bidang Pembangunan Desa**

Menurut Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.

Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa klasifikasi belanja bidang pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; kawasan permukiman; kehutanan dan lingkungan hidup; perhubungan, komunikasi dan informatika; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata.

Menurut Puspawijaya (2016:41), Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial

(indeks ketahanan sosial-IKS), dimensi ekonomi (indeks ketahanan ekonomi-IKE), dan dimensi ekologi (Indeks ketahanan Lingkungan-IKL). Indeks ketahanan sosial terdiri dari dimensi: modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi. Sedangkan indeks ketahanan lingkungan terdiri dari dimensi ekologi.

Berdasarkan definisi diatas belanja bidang pembangunan desa adalah pembangunan desa yang bersumber dari perpaduan antara partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam urusan penyediaan infrastruktur, pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; kawasan permukiman; kehutanan dan lingkungan hidup; perhubungan, komunikasi dan informatika; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata.

- **Belanja Desa Bidang Pembinaan Masyarakat Desa**

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.

Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa klasifikasi belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang : ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; kebudayaan dan kegamaan; kepemudaan dan olah raga; dan kelembagaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas Belanja Desa Bidang Pembinaan Masyarakat Desa adalah program dan kegiatan sebagai proses masyarakat mencapai tujuan melalui pendidikan formal maupun non formal di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; kebudayaan dan kegamaan; kepemudaan dan olah raga; dan kelembagaan masyarakat.

- **Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat sejatinya harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat yaitu dengan menyediakan pengetahuan, sumber daya, dan ketrampilan baik kepada kelompok maupun individu untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan masa depan sehingga berpartisipasi dalam mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Daulay (2006), pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Slamet (2003) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya. Menurut Sumodiningrat (1999) arti empowerment atau pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Pasal 17 ayat 4 : belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah belanja desa yang diperuntukkan kedalam sub kegiatan kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparatur Desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal; dan perdagangan dan perindustrian.

Berdasarkan beberapa definisi di atas Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah program dan kegiatan yang dianggarkan desa untuk menjadikan masyarakat mampu mampu membangun dirinya sendiri sehingga mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di bidang kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparatur Desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal; dan perdagangan dan perindustrian.

- **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**

Menurut buku Desa dan Kelurahan tangguh bencana yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (2017) bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sedangkan Menurut Atmari (2021), Desa Tanggap Bencana adalah desa yang sadar risiko bencana, memiliki kegotongroyongan melakukan upaya pengurangan risiko bencana, memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kemampuan memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Pasal 17 ayat 5 : belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak desa adalah belanja desa yang diperuntukkan kedalam sub kegiatan :

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Berdasarkan beberapa definisi diatas belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat adalah upaya penanggulangan bencana yang terjadi di desa yang disebabkan baik faktor alam maupun nonalam, sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan untuk meminimalisir kerugian baik jiwa maupun materil.

2.2 Konsep Indeks Desa Membangun

Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Indeks Desa Membangun merupakan salah satu alat ukur tingkat pembangunan desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Indeks Desa Membangun didesain

memperkuat upaya mencapai tujuan pembangunan desa dan bermanfaat dalam menganalisis status perkembangan masing-masing desa yang berkaitan erat dengan karakteristik serta dikembangkan sebagai instrument pencapaian target rencana pembangunan pemerintah (Hanibal, 2015). Indeks Desa Membangun membagi desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Indeks Desa Membangun atau yang disingkat IDM adalah suatu angka komposit untuk mengukur tingkat pembangunan di desa. Indeks Desa Membangun Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukur perkembangan Status Kemandirian desa-desa melalui perhitungan nilai komposit nilai skoring masing-masing indikator yang telah ditetapkan serta otoritas tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian Desa, PDPT. Sehingga hasil dari analisa IDM dalam penetapan status desa akan menjadi barometer dalam perencanaan.

Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Paradigma ini menyatakan bahwa desa merupakan subjek pembangunan nasional. Status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas Indeks Desa Membangun adalah suatu alat ukur keberhasilan pembangunan desa dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi, status desa dibagi kedalam lima (5) tingkat status desa desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

2.2.1 Variabel Didalam Indeks Desa Membangun

Tabel 5 Dimensi dan Variabel Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Dimensi	Variabel
1.	Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan
		2. Keberdayaan Masyarakat utk Kesehatan
		3 Jaminan Kesehatan
	Pendidikan	4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah
		5 Akses Pendidikan Non Formal
		6 Akses ke Pengatahuan
	Modal Sosial	7 Memiliki Solidaritas Sosial
		8 Toleransi
		9 Rasa Aman Penduduk
		10 Kesejahteraan Sosial
	Permukiman	11 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak
		12 Akses ke Sanitasi
		13 Akses ke Listrik
		14 Akses Informasi dan Komunikasi
2.	Ketahanan Ekonomi	15 Keragaman Produksi Masyarakat Desa
		16 Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan
		17 Akses Distribusi/Logistik
		18 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
		19 Lembaga Ekonomi
		20 Keterbukaan Wilayah
3.	Ketahanan Ekologi	21 Kualitas Lingkungan
		22 Potensi/Rawan Bencana Alam

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015

2.2.2 Metode Penyusunan Idm

Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

- a) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- b) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- c) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$$

IDM = Indeks Desa Membangun

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

2.3 Konsep Indeks Ketahanan Lingkungan

Menurut Jumiadin (2018), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator kunci, yakni indikator kualitas lingkungan dan indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Masing-masing indikator memiliki 2 (dua) variabel, yakni: indikator kualitas lingkungan: (i) ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara, dan (ii) terdapat sungai yang terkena limbah, sedangkan indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana: (i) kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan), dan (ii)

Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Tehnik Perhitungan IKL

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD Analytical Hierarchy Process (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

$$I_x = \frac{\sum_1^n Skor X}{n_x \times 5}$$

I_x = indeks

n = jumlah indikator

III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Magister Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Lampung yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Kecamatan. Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Juni 2022. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dalam mencari pemecahan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian, atau untuk menguji hipotesis.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Peralatan yang digunakan antara lain adalah:

- 1) Komputer
- 2) Alat tulis (buku, pena dan pensil)
- 3) Aplikasi sipede
- 4) Aplikasi SPSS
- 5) Microsoft Office

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Kurniawan (2018: 37) “Penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu kondisi secara objektif”.

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi masing-masing variabel yang peneliti gunakan dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Operasional Variabel	Dimensi	Skala Pengukuran	Volume
PADes (X ₁)	PADes adalah dana yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Penerimaan / Sumber Dana	Rasio	Rupiah
DD (X ₂)	Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai belanja bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Nilai variabel yang digunakan dalam Dana Desa (DD) adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Penerimaan / Sumber Dana	Rasio	Rupiah
ADD (X ₃)	ADD merupakan dana yang bersumber dari APBD Kab/Kota, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kab/Kota paling sedikit 10%. Nilai variabel yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Penerimaan / Sumber Dana	Rasio	Rupiah
DBH (X ₄)	DBH adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah. Nilai variabel yang digunakan dalam Dana Bagi Hasil dan Retribusi (DBH) adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Penerimaan / Sumber Dana	Rasio	Rupiah
DLL (X ₅)	Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Penerimaan / Sumber Dana	Rasio	Rupiah
Luas Wilayah Desa (X ₆)	Kesatuan geografis dengan batas-batas spesifik. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk satuan kilo meter / segi (KM ²)	Panjang, Lebar	Rasio	Km ²
Jumlah Penduduk Desa (X ₇)	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis desa. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk jiwa (Orang)	Kuantitas	Rasio	Jiwa
Bidang Pemerintahan Desa (X ₁)	Penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Pengeluaran / Alokasi Dana	Rasio	Rupiah
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (X ₂)	Penyelenggaraan benja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata. Nilai Variabel	Pengeluaran / Alokasi Dana	Rasio	Rupiah

Variabel	Operasional Variabel	Dimensi	Skala Pengukuran	Volume
	yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).			
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (X ₃)	Belanja ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olah raga, kelembagaan masyarakat. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Pengeluaran / Alokasi Dana	Rasio	Rupiah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat (X ₄)	Belanja kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha kecil dan menengah, dukungan penanaman modal dan perdagangan dan perindustrian. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Pengeluaran / Alokasi Dana	Rasio	Rupiah
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat (X ₅)	Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak. Nilai Variabel yang digunakan adalah dalam bentuk ribuan rupiah (Rp).	Pengeluaran / Alokasi Dana	Rasio	Rupiah
IDM (Y ₁)	Pada penelitian ini variabel terkaitnya (Y ₁) adalah IDM yang tersusun dari 3 dimensi : 1. IKL; 2. IKE; 3. IKS. Satuan pengukuran yang digunakan untuk IDM adalah Indeks	Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Rasio	Indeks
IKL (Y ₂)	Pada penelitian ini variabel terkaitnya (Y ₂) adalah ketahanan lingkungan sebagai indikator keberhasilan menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi potensi bencana. Satuan pengukuran yang digunakan untuk IKL adalah Indeks	Lingkungan	Rasio	Indeks

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2019, berupa data : IDM, IKL, pendapatan desa (PADes, DD, ADD, DBH dan Lain-lain), luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, belanja desa (Belanja bidang pemerintahan desa, belanja bidang pembangunan desa, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak), yang dikumpulkan dari beberapa instansi dan satuan kerja terkait. Rincian jenis data dan sumber data tabel berikut ini :

Tabel 7 Jenis data dan sumber data

Jenis data	Sumber data
Nilai Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Lampung Selatan	Kementrian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Kabupaten Lampung Selatan	Kementrian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
APBDes Kabupaten Lampung Selatan <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran belanja bidang pemerintahan desa • Anggran belanja bidang pembangunan desa • Anggaran belanja bidang pembinaan kemasyarakatan • Anggaran belanja bidang pemberdayaan kemasyarakatan • Anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat 	Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan / Siskudes
Sumber dana APBDes <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa (DD) • Alokasi Dana Desa (ADD) • Pendapatan Asli Desa (PADes) • Pendapatan lain-lain 	Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan. / Siskudes Siskudes
• Dana Bagi Hasil dan Retribusi (DBH)	Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah
• Luas wilayah desa	BPS Kabupaten Lampung Selatan
• Jumlah penduduk	BPS Kabupaten Lampung Selatan

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Dalam melakukan penelitian langkah yang paling penting adalah menentukan populasi. Menurut Nuryadi (2017:8) Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Sedangkan populasi menurut Sugiyono (2018 : 130) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 256 desa.

3.6.2 Sampel Jenuh (Sampel Sensus)

Menurut Sugiyono (2018 : 131) sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018:82). Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2018:82). Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian jenuh/sensus maka yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh desa di Kabupaten Lampung selatan yang berjumlah 256 desa.

3.7 Metode Analisis

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:19) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dapat diukur dengan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness).

3.7.2 Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analisis regresi linier berganda Uji regresi linier berganda. Metode analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk menduga nilai parameter variabel bebas yang dihipotesiskan mempengaruhi IDM. Unit wilayah dalam analisis ini adalah desa di Kabupaten Lampung Selatan. Persamaan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi capaian IDM adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$$

Keterangan:

Y_1	= IDM
β_0	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,5,6,7}$	= Koefisien korelasi
X_1	= Pendapatan Asli Desa (PADesa)
X_2	= Dana Desa (DD)
X_3	= Alokasi Dana Desa (ADD)
X_4	= Dana Bagi Hasil (DBH)
X_5	= Pendapatan lain-lainnya
X_6	= Luas wilayah
X_7	= Jumlah penduduk
e	= Faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi

Terdapat 7 variabel bebas yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan Persamaan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi capaian IKL adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y_2	= Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
β_0	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,5}$	= Koefisien korelasi
X_1	= Belanja bidang pemerintahan desa
X_2	= Belanja bidang pembangunan desa
X_3	= Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa
X_4	= Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan
X_5	= Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat
e	= Faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi

Terdapat 5 variabel bebas pengeluaran belanja APBDes yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap capaian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Pengujian model regresi linear berganda dilakukan dengan uji Asumsi Klasik menurut Janie (2012), yaitu:

- a. Uji Normalitas bertujuan menguji model regresi dan variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. Uji normalitas terdiri dari uji t dan F yang mengasumsikan bahwa nilai residual memiliki nilai distribusi normal.
- b. Uji Multikolinieritas bertujuan menguji adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas pada model regresi.
- c. Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk melihat model regresi memiliki varian yang sama.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R Square)

Menurut Nugroho (2005), koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R square), berkisar antara 0 sampai 1. Pada umumnya sampel yang menggunakan data deret waktu (time series) memiliki nilai R square cukup tinggi (> 0.5), sedangkan sampel yang menggunakan data item tertentu (cross-sectional) pada umumnya memiliki nilai R square agak rendah (< 0.5), namun tidak menutup kemungkinan data jenis cross-sectional memiliki nilai R square cukup tinggi.

3.7.4 Uji F (simultan)

Uji-F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2018, 98).

Adapun kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut antara lain :

- Bila nilai F hitung \leq F tabel, maka terima H_0
Bila nilai F hitung $>$ F tabel, maka tolak H_0 dan terima H_1
- Bila nilai p-value (Sig.) $>$ α , maka terima H_0
Bila nilai p-value (Sig.) $<$ α , maka tolak H_0 dan terima H_1

3.7.5 Uji t (parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Adapun kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut antara lain :

- Bila nilai t hitung \leq t tabel, maka terima H_0
Bila nilai t hitung $>$ t tabel, maka tolak H_0 dan terima H_1
- Bila nilai p-value (Sig.) $>$ α , maka terima H_0
Bila nilai p-value (Sig.) $<$ α , maka tolak H_0 dan terima H_1 .

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil analisis di dapatkan hasil, bahwa variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Retribusi, Dana Lain-lain, Luas Wilayah Desa, dan Jumlah Penduduk Desa secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Dasa Membangun di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Berdasarkan hasil analisis di dapatkan hasil, bahwa variabel Pendapatan Asli Desa, variabel Dana lainnya, dan variabel Luas Wilayah secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di kabupaten Lampung Selatan. Variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks desa membangun, variabel Alokasi Dana Desa, variabel Dana Bagi Hasil, variabel Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Berdasarkan hasil analisis di dapatkan hasil, bahwa variabel Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat Desa secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan.
- d. Berdasarkan hasil analisis di dapatkan hasil, bahwa variabel Belanja Bidang Pemerintahan Desa, variabel Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, variabel Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan di Kabupaten

Lampung Selatan. Variabel Belanja Bidang Pembangunan Desa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks ketahanan lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan, dan variabel Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun, salah satu peran kunci adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan dana desa agar mampu merencanakan kegiatan yang dapat mengintervensi guna meningkatkan nilai IDM. Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks desa membangun hal ini disebabkan dalam penggunaan dana desa masih belum mengintervensi kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan indeks desa membangun di Kabupaten Lampung Selatan. kegiatan-kegiatan tersebut seperti :

1. Penyediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya), jaminan sosial bagi masyarakat miskin) su bidang kesehatan.
2. Penyediaan fasilitas kesehatan khususnya posyandu, poskesdes dan polindes.
3. Menyediakan fasilitas olahraga desa sebagai sarana aktifitas masyarakat desa (modal sosial)
4. Melakukan pemetaan dan pembangun sarana IPAL dan akses jamban bagi masyarakat yang belum memiliki jamban (pemukiman)
5. Penyediaan pasar desa sebagai sarana masarakat menjual hasil produksi baik pertanian maupun olahan rumahan.
6. Pengawasan pencemaran air (pengambilan sampel air konsumsi masyarakat untuk dilakukan tes laboratorium), tanah dan udara.
7. Menyiapkan fasilitas mitigasi bencana alam di desa berupa peringatan dini bencana, menyiapkan fasilitas mitigasi bencana alam di desa berupa perlengkapan keselamatan, menyiapkan fasilitas mitigasi bencana alam di desa berupa jalur evakuasi.

8. Memendorong program inovasi desa dengan kegiatan tersebut diharapkan desa semakin maju dan sejatera dengan cara melakukan kerjasama dengan universitas/perguruan tinggi untuk mencari potensi di masing-masing desa.
9. Mengoptimalkan potensi keindahan alam yang ada di desa-desa lampung selatan sebagai destinasi wisata.

Untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan lingkungan :

1. Pemerintah desa diharapkan lebih banyak mengalokasikan kegiatan pada bidang belanja pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih berorientasi kepada pelestarian lingkungan seperti pemberdayaan masyarakat terkait dengan usaha kehutanan berupa sosialisasi dan penyuluhan perlindungan kawasan hutan register dan hutan desa.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa yang utuh mengenai pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan kehidupan. Hal ini bisa dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup, dan dinas pendidikan.
3. Pembinaan masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan yang bertujuan membina warga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan seperti pemilahan sampah sampai pengolahan juga melibatkan skala rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N 2020. *Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Pati*, Jurnal Litbang Jawa Tengah. Vol 12 No 2
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Akbar, P.S., & Usman. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Antara, I. G. M. Y dan Suryana, I. G. P. E, 2020. *Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali*, Jurnal MKG Vol. 1. No. 1. Juni 2020 (63-73)
- Atmadja, AT., Saputra, K. A.K., Koswara, M. K. (2018). *The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government OnThe Success Of Budget Management*. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 1 (22). ISSN 1528-2635
- Baridwan, Zaki. (2015). *Intermediate Accounting* (Edisi 8).Yogyakarta: BPFE
- Balandatu, Evelin. (2016). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Jurnal Eksekutif, 1 (7). ISSN 2337-5736.
- Bintarto, R.(1989). *Interaksi Desa Kota dan permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BSN 2017, *Desa dan kelurahan tangguh bencana*, Jakarta
- Cicillia Ratnasari, Winston Pontoh & Robert Lambey, 2021. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak 23 Pada Pt Aneka Gas Industri, Tbk = Filling Station Manado*, Jurnal EMBA
- Diana, A dan Setiawati, L. (2011). *Sistem informasi Akutansi*. Yogyakarta:Andi
- Fahmi, (2015). *Etika Bisnis (Teori Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.

- Firdaus. R (2020), *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec.Manding Kab.Sumenep*. JIP Vol.1 No.7 Desember 2020
- Garrison, R.H and Norren, E.W. 2006. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gani A, Arief M. 2020. *Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Indikator Ketahanan Sosial , Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. *J. Ilmu Ekon.* 3(1):78–88.
- ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hamidi, H. 2015. *Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*, Jakarta Selatan
- Hanif Nurcholis 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Halim, A & Kusufi, S. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. 2006. *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis*. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* Vol 9.
- Jaelani, A. (2015). *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam*. *Proceedings 3th International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES)*, vol. 1, November 2-3, 2015. FE-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. ISSN: 2476-9851 Aan Jaelani (SCOPUS ID: 57195963463)
- Jumiadin dan Sunarwan Asuhadi, 2018 *Kajian Aspek Lingkungan Hidup Pada Pengukuran Pembangunan Desa Di Kabupaten Wakatobi* *Ecogreen* Vol. 4 No. 2, Oktober 2018
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat FM, et al. 2016. *Desa dan Hukum Adat : Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan*. *Unisbank Semarang*. 3(6):461–468.
- Kharisma, B. et. al. 2021. *Distribusi Belanja dan Capaian Status Pembangunan Desa di Provinsi Riau*. *Journal of Economics and Business*, 5(2), September 2021, 407-416

- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lalira. et al. 2018. *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. J. Berk. Ilm. Efisiensi. 18(4):62–72.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Rimawan 2019. *Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
- M Arifin, 2008. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, h. 30
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.
- Maryunani. 2008, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhtarom et al. 2018. *Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District*. Inov. Pembang. J. Kelitbangan. 6(02):179–190.doi:10.35450/jip.v6i02.96.
- Moehersono. 2012. *“Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurlaelah, Hanifah & Nurhayasari 2011. *Analisis Anggaran Penjualan Dan Laba Akuntansi Pada Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Lebak*, Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis
- Nuryadi, et al. 2017 *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, SIBUKU MEDIA. Yogyakarta, ISBN: 978-602-6558-04-6
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho BA. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta [ID] : Penerbit Andi
- Oktaviana O, & Bachrudin (2017). *Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi*. LAB-AP FISIP Untirta

- Puspawjaya, A, Julia Dwi Naritha S (2016), *Pengelolaan keuangan desa*.
- Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto.2002. *Dana Alokasi Umum di Masa depan*. Jakarta
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD
- Setiyawati, A. Hamzah, A. (2017). *analisis pengaruh pad, dau, dak, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur* - Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2007 - jaki.ui.ac.id
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sunu, M, K & Utama, M S. 2019. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana. 8:843.doi:10.24843/eeb.2019.v08.i08.p02.
- Susilawati N. 2012. *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. *Sociol. Pedesaan.*:1–148.
- Supriyadi., Praseyto, W., Irmadariyani, L. (2016). *The Village's Financial Management Accountability Case Study On Klompangan Village Ajung Jember Regency. Proceedings International Conference on Business and Accounting Studies Faculty of Economics and Business University of Jember.*, 614-638. ISBN 978-602-60569-1-7.
- Suryani, et al. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta*. *Jurnal Penyuluhan*. 1-8 hlm
- W. Sumpeno, Cetakan 2 (edisi kedua) – 2011, *perencanaan desa terpadu*
- Wilkinson, D., Benson D, Jordan A. 2008. *Green Budgeting*. In Jordan A.J. & Lenschow A. (Ed.): *Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability*. UK: Edward Elgar Publishing Ltd. P. 70-73

- Widjaja, HAW. 2002. Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. HAW, 2004, “*Otonomi Desa*”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yulitasari Y, Tyas WP. 2020. *Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah*. J. Reg. Rural Dev. Plan. 4(2):74–83.doi:10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83.
- Zulia, 2011. *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Ilmiah & Bisnis* ISSN 1693-7619 Vol 10 No2 April 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang *Indeks Desa Membangun*.hlm 1–32.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*..
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*. Dpr.:249.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun. 1979. Tentang *Pemerintahan Desa*.hlm 32.
- Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang *Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*